

BAB VI

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat setelah pemekaran wilayah tahun 2015-2018. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi karena Indeks Pembangunan Manusia merupakan representasi dari kualitas manusia itu sendiri, apabila kualitas manusia membaik setiap harinya, maka tingkat kehidupan akan membaik seiring kenaikan Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri.
2. Laju pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat setelah pemekaran Tahun 2015-2018. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan di Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang relatif tinggi dan diiringi dengan tingkat kualitas sumber daya manusia yang baik dilihat dari sisi tingkat IPM. Selain itu, penduduk di Jawa Barat juga didominasi oleh penduduk

angkatan kerja tercatat pada tahun 2018 saja dengan tingkat jumlah penduduk sebesar 46,8 juta jiwa, didalamnya terdapat penduduk angkatan kerja sebesar 22 juta jiwa.

3. PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat setelah pemekaran wilayah tahun 2015-2018. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Pada penelitian ini artinya setiap peningkatan PDRB akan mengurangi kemiskinan/jumlah penduduk miskin di setiap daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak pada peningkatan pendapatan di masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kemiskinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Angka IPM merepresentasikan kualitas hidup manusia yang di dalamnya terdiri dari ukuran pendidikan, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. Ini menjadi sangat penting karena dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan merancang suatu program yang berkesinambungan agar dapat memacu naiknya nilai IPM

mengingat tingkat IPM di Provinsi Jawa Barat belum mencapai target sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2018.

2. Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, dimana jika Laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan maka kemiskinan akan menurun. Ini menjadi tren yang baik untuk masa depan Indonesia mengingat pada tahun 2030 Indonesia akan menikmati bonus demografi. Maka kualitas penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat harus tetap dipertahankan dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan dapat menikmati bonus demografi tahun 2030. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kesempatan kerja yang harus merata disetiap wilayah, sehingga dapat menekan angka pengangguran yang nantinya akan berpengaruh penurunan kemiskinan yang ada di provinsi Jawa Barat. Selain itu program Kampung KB (Keluarga Berencana) selama periode penelitian telah mencapai keberhasilan. Tercatat pada tahun 2018 ada sekitar 1.300 desa yang telah mengikuti program Kampung KB tersebut, hal ini tentu harus terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.
3. PDRB berhubungan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak pada peningkatan pendapatan di

masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kemiskinan. Perlu adanya usaha untuk terus meningkatkan PDRB agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan, Salah satunya dengan cara menambah lapangan pekerjaan dan menaikkan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, pemerataan distribusi pendapatan dan memberikan penghasilan bagi orang yang tidak bekerja sebelumnya yang dapat mendorong pada meningkatnya konsumsi.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini periode tahun penelitian yang relatif singkat yaitu selama 4 tahun, dari tahun 2015-2018. Hal ini dilakukan karena demi kelengkapan data yang relevan dengan judul yang diajukan dalam penelitian ini. Karena perlu diketahui, Kabupaten Pangandaran baru memiliki bupati pada tahun 2016 yang sebelumnya masih dipimpin oleh pejabat bupati. Hal ini menjadi penyebab data Kabupaten Pangandaran menjadi lengkap sesuai dengan periode tahun penelitian dan variabel yang bersangkutan.
2. Ada banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel saja yang didapatkan dan dianalisis.